

# Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara

by Dr. Fitrawaty, S.p., M.si

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY

---

**Submission date:** 13-Feb-2023 10:47AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2012676040

**File name:** daerah\_terhadap\_indeks\_pembangunan\_manusia\_di\_Sumatera\_Utara.pdf (1.19M)

**Word count:** 6470

**Character count:** 37954



## Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara

Heniwati Gulo\*, Fitrawaty, Arwansyah

Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Indonesia  
Correspondance: henygulo75@gmail.com

Received: 15 December 2022; Reviewed: 15 January 2023; Accepted: 20 January 2022

**Abstract:** IPM (The Human Development Index) is an indicator in measuring the level of success in improving the quality of human life and determining the rank/level of development of a region. Increasing human resources is also interpreted as increasing the basic capabilities of the population, therefore increasing opportunities to be able to participate in the human development process which requires several basic indices such as spending, education, and health. How is the allocation of regional revenues (Special Allocation Funds, General Allocation Funds, and Local Own Revenue) in the success of human development in matters of infrastructure, health, and education which is one of the important roles of regional regulations in efforts to increase human development. This research was conducted with the aim of knowing "the effect of special allocation funds, general allocation funds and Local Own Revenue on the human development index in North Sumatra Province". Secondary data in the form of panel time series regression data for 2015-2019 from 8 Cities and 25 Regencies in North Sumatra Province was used as a data source by researchers and then analyzed using the FEM (Fixed Effect Model) model. The conclusion that the researchers obtained stated "partially Special Allocation Funds, General Allocation Funds and Local Own Revenue partially have a positive and significant effect on the Human Development Index in North Sumatra Province and simultaneously Special Allocation Funds, General Allocation Funds and Local Own Revenue have a positive effect and significant to the Human Development Index in North Sumatra Province.

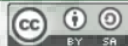
**Keywords:** Special allocation fund, General allocation fund, Regional original revenue, Fixed effect model (FEM)

**Abstrak:** IPM (Indeks Pembangunan Manusia) ialah sebuah indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan peningkatan kualitas hidup manusia serta menetapkan ranking/tingkat pembangunan sebuah daerah. Peningkatan SDM diartikan juga sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk, oleh karena itu meningkatkan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan manusia yang mana di dalamnya membutuhkan beberapa indeks dasar seperti pengeluaran, pendidikan, serta kesehatan. Bagaimana pengalokasian pendapatan daerah (dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah) dalam mensukseskan pembangunan manusia dalam urusan infrastruktur, kesehatan, maupun pendidikan menjadi salah satu peran penting Perda dalam upaya peningkatan pembangunan manusia. Riset ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder berupa regresi data panel *time series* tahun 2015-2019 dari 8 Kota dan 25 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dijadikan sebagai sumber data oleh peneliti lalu dianalisis melalui model FEM (*Fixed Effect Model*). Kesimpulan yang peneliti peroleh menyatakan secara parsial DAK, DAU dan PAD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara dan secara simultan dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara".

**Kata Kunci:** dana alokasi khusus, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, *fixed effect model* (FEM).

© 2023 The Authors

<https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13725>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### PENDAHULUAN

Pembangunan diartikan sebagai sebuah proses perubahan yang berlangsung secara berkelanjutan ke arah yang lebih baik dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, berdaya saing, serta adil. Sebuah kesadaran dalam melakukan pembangunan

dan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat maupun pemerintah, agar hal tersebut dapat terealisasi dengan baik (Nandita et al, 2019). Sedangkan dalam mengukur keseluruhan kinerja pembangunan membutuhkan yang namanya pembangunan manusia dan dilakukan dengan pendekatan tiga dimensi dasar yaitu digambarkan melalui beberapa indikator, kehidupan serta pengetahuan yang layak, dan umur yang sehat dan panjang (BPS, 2019). IPM terdiri atas tiga unsur yakni ekonomi atau standar hidup yang layak, pendidikan yang dicapai, serta kesehatan (Machmud & Djau, 2019). Peningkatan sumber daya manusia mempunyai makna peningkatan kapasitas dasar penduduk, sehingga dapat memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, jadi pembangunan manusia menjadi sentral sebab pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dapat memecahkan persoalan kesejahteraan masyarakat (Sudarmanto et al, 2020). Peningkatan modal manusia dapat diperlihatkan dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat sehingga mampu meningkatkan value added seorang individu dan diharapkan perkembangan ekonomi dapat berjalan lebih baik (Purba et al, 2021).

Pembangunan manusia juga termasuk pembangunan infrastruktur (secara lahiriah) dan spirit (secara batin). Perlu dilakukan beberapa kali peninjauan dalam mengetahui perkembangan sebuah pembangunan, dan untuk melihatnya dibutuhkan sebuah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai indikatornya (Septyana, 2021). Agar disparitas pada setiap daerah di Indonesia dapat diminimalisir dengan baik, pemerintah perlu memperhatikan lagi proses pengupayaan pembangunan manusia melalui IPM ini. Bagaimana pengalokasian pendapatan daerah dalam mensukseskan pembangunan manusia dalam urusan infrastruktur, kesehatan, maupun pendidikan menjadi salah satu peran penting peraturan daerah dalam upaya tersebut. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu pemerataan, produktivitas, pemberdayaan dan kesinambungan, untuk meningkatkan IPM tidak hanya bertumpu pada peningkatan ekonomi semata, namun diperlukannya pembangunan dari segala aspek, dengan adanya pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua masyarakat merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut (Patadang et al., 2021).

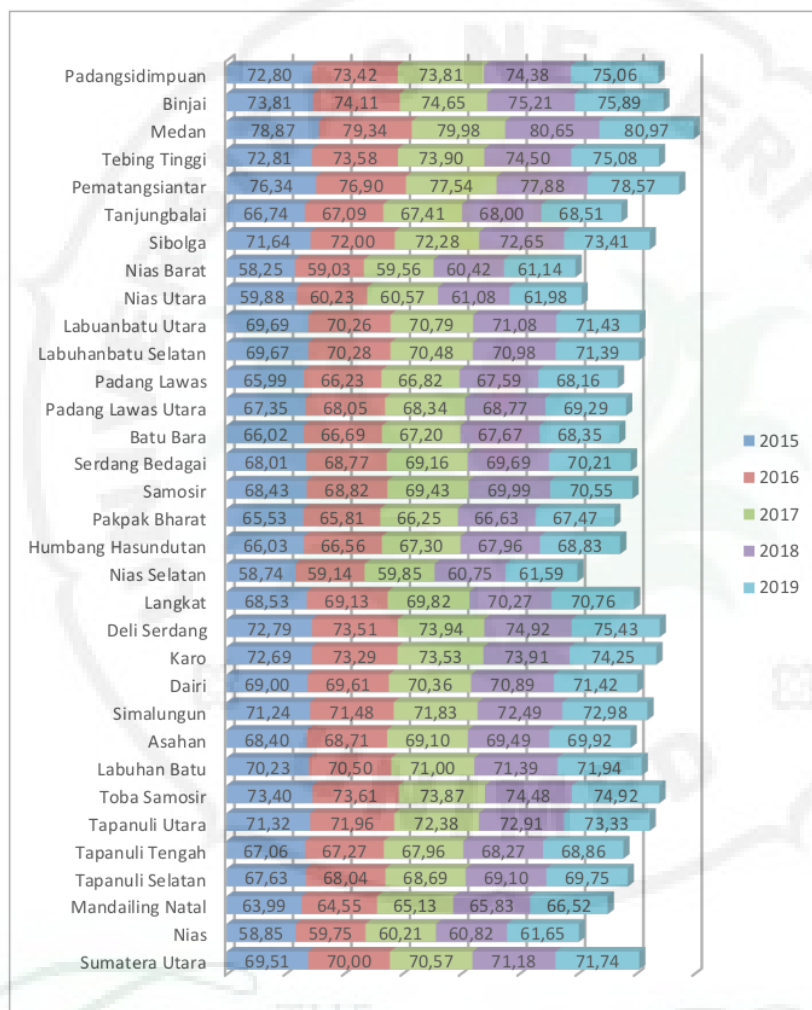
Tabel 1. Perkembangan komponen IPM Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (AHH)	68,29	68,33	68,37	68,61	68,95
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,82	13,00	13,10	13,14	13,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,03	9,12	9,25	9,34	9,45
Pengeluaran Per Kapita (PPK)	Rp 9.563.000	Rp 9.744.000	Rp 10.036.000	Rp 10.391.000	Rp 10.649.000
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,51	70,00	70,57	71,18	71,74

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan data table 1, setiap tahun perkembangan IPM di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2015 IPM Sumatera Utara mencapai 69,51 dalam hal ini peningkatan terjadi pada tahun 2016 mencapai sebesar 70,00. Tahun 2017 IPM meningkat sebesar 70,57 dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2018 IPM mengalami peningkatan

dengan mencapai 71,18. Dibandingkan tahun 2017, angka ini mengalami peningkatan 0,61 poin. Sementara pada tahun 2019 IPM Sumatera Utara mencapai sebesar 71,74 yang artinya dibandingkan 2018 terjadi peningkatan 0,79% atau 0,56 poin. Namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan IPM pada Kota/Kabupaten lainnya yang melebihi Sumatera Utara. Hal tersebut bisa diamati pada masing-masing IPM di kabupaten/kota yang peningkatan IPM berbeda-beda setiap tahunnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019

Gambar 1. IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019

Sajian data tersebut menyimpulkan bahwa pada 2015 IPM di beberapa kabupaten seperti Nias Selatan dan Nias Barat masuk ke dalam kategori rendah, berbeda dengan Nias Utara dan Gunungsitoli. Dibandingkan wilayah lain di Provinsi Sumatera Utara, beberapa wilayah yang telah disebutkan tadi tergolong sebagai wilayah ber-IPM rendah. Namun Kabupaten Nias di Pulau Nias menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami peningkatan kategori IPM pada tahun 2017, yakni dari rendah menjadi sedang. Kabupaten Nias selatan dan Kabupaten Nias Barat masih memiliki IPM berkategori rendah di Pulau Nias.

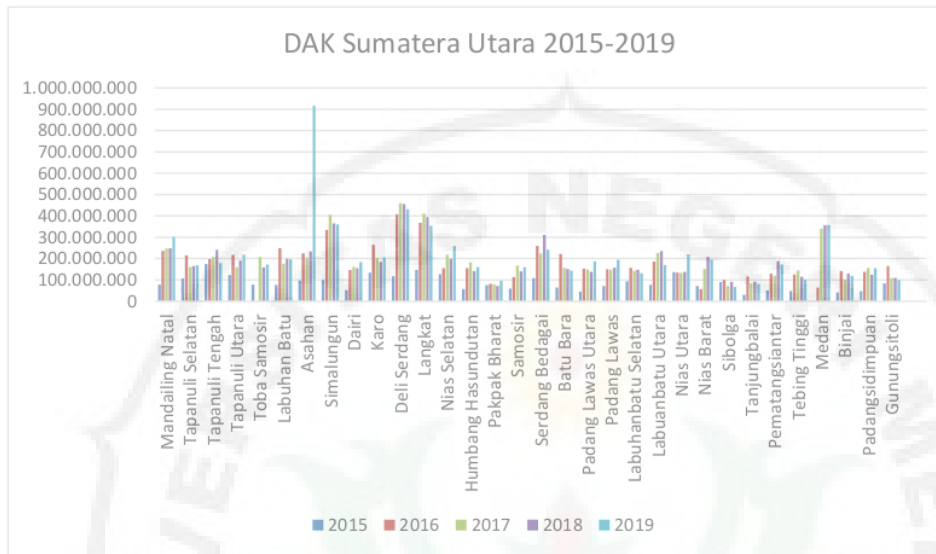


Perkembangan IPM yang tertinggi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 dimiliki oleh Kota Medan sebesar 80,97. Sementara IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Nias Barat yakni sebesar 61,14. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Nias Barat yakni minimnya ketersediaan dan akses pendidikan maupun kesehatan. Penyebab IPM yang rendah lainnya ialah SDM yang masih rendah, tidak memadainya infrastruktur yang ada, serta tidak kompetennya para pemimpin seperti kepala badan perencanaan pembangunan dan dinas pekerjaan umumnya (BPS, 2019). Hal-hal tersebut mengakibatkan munculnya kesenjangan pembangunan manusia antar warganya.

Terdapat sebanyak 11 Kota/Kabupaten yang mempunyai capaian IPM Sumatera Utara dan sebanyak 22 kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM dibawah IPM Sumatera Utara. Meningkatnya aspek standar hidup layak, pengetahuan, serta hidup sehat dan umur panjang menjadi faktor utama dalam meningkatkan IPM di wilayah tersebut. Rendah atau tingginya IPM pada Kabupaten/Kota akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi (Mahroji & Nurhasanah, 2019). Disparitas pembangunan antar wilayah disebut-sebut disebabkan oleh IPM karena terjadi perbedaan tingkat IPM di masing-masing wilayah (Afini, 2019). Ketidakmerataan IPM ini menyebabkan perbedaan kemajuan wilayah di beberapa daerah, rendahnya kualitas manusia (IPM) membuat suatu daerah menjadi kurang maju begitupun sebaliknya. Disparitas ini akan terus melebar jika tidak ditangani dengan baik dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan pembangunan (Hendarmin, 2019).

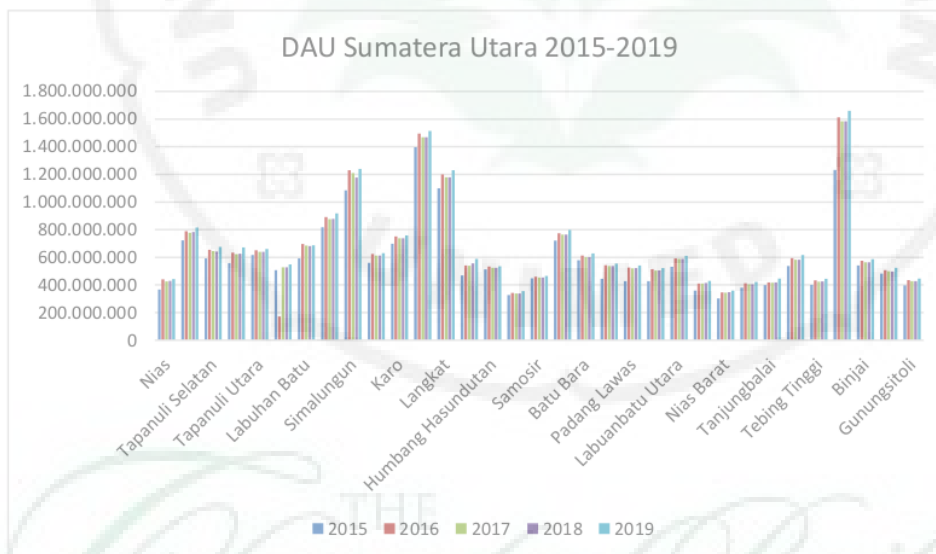
Berdasarkan gambar 2 dapat disimpulkan bahwa pada 5 tahun berturut-turut, dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, DAK Provinsi Sumatera Utara berjumlah Rp 2.814.987.558.000. DAK tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp 174.579.680.000 dan DAK terendah diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 0. Pada tahun 2016, DAK Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan mencapai jumlah Rp 5.834.432.340.000. DAK tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 408.339.325.000 dan DAK terendah diperoleh oleh Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 0. Tahun 2017, DAK Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 6.269.699.927.000. DAK tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 459.510.224.000 dan DAK terendah diperoleh oleh Kota Sibolga sebesar Rp 70.813.424.000. Tahun 2018, DAK Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 6.407.893.532.000. DAK tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 455.242.047.000 dan DAK terendah diperoleh oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 71.532.319.000. Pada tahun 2019, DAK Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 7.168.203.029.000. DAK tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Asahan sebesar Rp 917.363.719.000 dan DAK terendah diperoleh oleh Kota Sibolga sebesar Rp 67.329.016.000. Pada tahun 2019, kontributor terbesar dari dana perimbangan adalah dana alokasi khusus yaitu sebesar 55,45%. Data tersebut menyimpulkan bahwa Kota/Kabupaten di Sumatera Utara menjadi salah satu contoh yang menunjukkan

bantuan dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah oleh Perda.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019

Gambar 2. Data DAK Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019



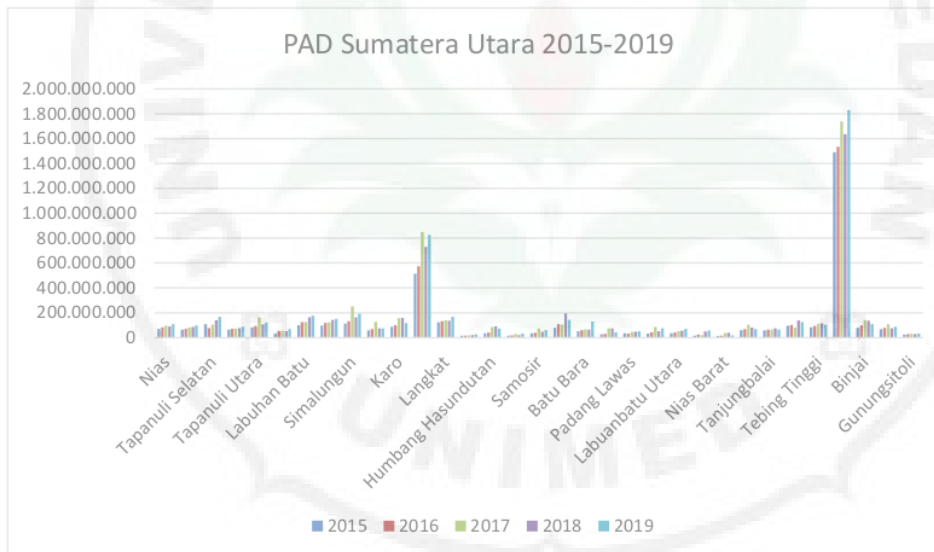
Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019

Gambar 3. Data DAU Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019

Berdasarkan sajian pada gambar 3 dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara selalu meningkat. Tahun 2015, DAU Provinsi Sumatera Utara berjumlah Rp 19.527.737.839.000. DAU paling tinggi didapatkan oleh Kabupaten Deli Serdang yakni Rp 1.396.297.620.000 semeny tara paling rendah didapatkan oleh Kabupaten Nias Barat yakni Rp 301.537.799.000. Tahun 2016, DAU Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dengan jumlah Rp 21.408.146.712.000.

Analisis pengaruh **dana alokasi khusus**, **dana alokasi umum** dan **pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara**

DAU tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.611.940.995.000 dan DAU terendah diperoleh oleh Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 171,553,711.000. Tahun 2017, DAU Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp 21.434,274.638.000. DAU tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.583.624.375.000 dan DAU terendah diperoleh oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 338.611.130.000. Tahun 2018, DAU Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp 21.442.356.759.000. DAU tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.583.624.375.000 dan DAU terendah diperoleh oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 339.271.690.000. Pada tahun 2019, DAU Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp 22.327.046.632.000. DAU tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.660.238.913.000 dan DAU terendah diperoleh oleh Kabupaten Pakpak Bharat sebesar Rp 354.721.524.000. DAU berasal dari APBN, jadi besaran DAU yang Perda peroleh bergantung pada pemerintah pusatnya. Data tersebut menyimpulkan bahwa Kota/Kabupaten di Sumatera Utara menjadi salah satu contoh yang menunjukkan bantuan dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah oleh Perda.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019

Gambar 4. Data PAD Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019

Berdasarkan sajian pada gambar 4, pada tahun 2015 PAD Provinsi Sumatera Utara berjumlah Rp 3.865.976.560.000. PAD tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.489.723.189.000 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp 14.492.750.000. Tahun 2016, PAD Provinsi Sumatera Utara berjumlah Rp 4.243.259.703.000. PAD tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.535.435.344.000 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp 15.711.221.000. Tahun 2017, PAD Provinsi Sumatera Utara berjumlah Rp 5.420.209.349.000. PAD tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.739.756.924.000 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 18.450.267.000. Tahun 2018, PAD Provinsi Sumatera Utara berjumlah Rp

5.160.752.592.000. PAD tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.829.665.882.000 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 19.605.735.000. Pada tahun 2019, PAD Provinsi Sumatera Utara berjumlah Rp 5.558.190.385.000. PAD tertinggi diperoleh oleh Kota Medan sebesar Rp 1.636.204.515.000 dan PAD terendah diperoleh oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp 18.411.236.000. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian didaerah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Tetapi ada beberapa Penerimaan Daerahnya yang masih Rendah, akan tetapi setiap tahunnya daerah tersebut mengalami peningkatan juga. Tetapi hanya beberapa persen saja dari Kabupaten/Kota yang lain dari Penerimaan Asli Daerahnya yang masih rendah yaitu Kabupaten Nias Selatan. Sehingga dengan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing belum tercukupi untuk membiayai daerahnya, pemerintah daerah mengharapkan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini yang membuat ketimpang disuatu daerah tinggi, dan membuat penduduk masyarakat didaerahnya menjadi tidak makmur dan sejahtera dikarenakan tinggi tingkat ketimpangan disuatu daerah tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk melihat Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode data yang bersifat kuantitatif. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data sekunder berupa regresi data panel time series tahun 2015-2019 dari 8 Kota dan 25 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dijadikan sebagai sumber data oleh peneliti, dari keseluruhannya kemudian didapatkan 165 observasi. Studi kepustakaan dengan mengeksplorasi berbagai sumber terkait seperti buku/jurnal dijadikan teknik dalam pengumpulan data tersebut. Data DAK, Data DAU, Data PAD dan Data IPM peneliti dapatkan dari situs website resmi BPS Sumatera Utara pada bagian laporan keuangan daerahnya yaitu <https://sumut.bps.go.id/>

Peneliti menggunakan sampel serta populasi penelitian yakni provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019 melalui beberapa kriteria penelitian dengan purposive sampling dalam menentukan sampelnya (Kresna & Ardini, 2020). Kriteria yang dimaksud tersebut yaitu Menerbitkan Laporan Keuangan berturut-turut tahun 2015-2019, Dipublikasikan pada website <https://sumut.bps.go.id/>, Memiliki data IPM yang lengkap dan konsisten tahun 2015-2019, Memiliki data yang konsisten dan lengkap terkait Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.



Analisis pengaruh **dana alokasi khusus**, **dana alokasi umum** dan **pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara**

Data panel **digunakan** dengan beberapa pertimbangan keuntungan yakni mampu menghasilkan *degree of freedom* lebih banyak karena di dalamnya menggabungkan dua jenis data yakni *cross section* serta *time series*, selain itu saat terdapat permasalahan mengenai hilangnya variabel, data ini mampu memberikan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya (Widarjono, 2018). Berikut bentuk persamaan analisisnya:

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 DAK_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \epsilon_i$$

Keterangan:

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- DAU = Dana Alokasi Umum
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- i = Jumlah *cross-section* atau Kabupaten/Kota
- t = Periode waktu atau *time series*
- $\beta_0$  = Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_8$  = Koefisien Regresi
- $\epsilon_i$  = *error term*

Peneliti memakai beragam jenis model pendekatan dalam metode ini, yakni *random effect model*, *fixed effect model*, serta *common effect model*. Selanjutnya melakukan langkah-langkah untuk memilih model regresi data panel yang peneliti gunakan yaitu dengan melakukan beberapa jenis tes.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemilihan Model Estimasi

#### Uji Chow (Chow Test)

Pengujian jenis ini bertujuan untuk menetapkan mana model yang paling tepat antara FEM dengan CEM dalam pengujian hipotesis berikut:

$H_0$  : nilai probabilitas  $> \alpha$  maka menerima  $H_0$ , artinya model CEM terpilih.

$H_1$  : nilai probabilitas  $< \alpha$  maka menolak  $H_0$ , artinya model FEM terpilih.

Cara melihat hasil pemilihannya yaitu dengan mengamati hasil uji chow ( $\alpha = 5\%$ ) pada  $p$ -value

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	168.911619	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	620.215992	32	0.0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 7, 2022

Sajian data tersebut menjelaskan bahwa dibandingkan CEM, model FEM dikatakan lebih baik karena  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak berdasarkan nilai nilai p-value cross-section F yang  $<0,05$  yaitu 0,0000.

#### Uji Hausman (Hausman Test)

Pengujian jenis ini bertujuan untuk menetapkan mana model yang paling tepat antara REM dengan FEM dalam pengujian hipotesis berikut:

$H_0$  : nilai probabilitas  $> \alpha$  maka menerima  $H_0$ , artinya model REM terpilih.

$H_1$  : nilai probabilitas  $< \alpha$  maka menolak  $H_1$ , artinya model FEM terpilih .

Cara melihat hasil pemilihannya yaitu dengan mengamati hasil uji hausman ( $\alpha = 5\%$ ) pada p-value

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.021159	3	0.0011

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 7, 2022

Sajian data tersebut menjelaskan bahwa dibandingkan REM, model FEM dikatakan lebih baik karena  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak berdasarkan nilai crosssection randomnya yang  $<0,05$  yaitu 0,0011.

#### Uji Langrange Multiplier (LM)

Apabila uji Chow mendapatkan hasil menolak  $H_0$  yang artinya FEM yang lebih baik maka diperlukan pengujian LM ini namun jika uji Hausman mendapatkan hasil menerima  $H_0$  yang artinya REM yang lebih baik, maka tidak lagi diperlukan uji LM (Hamza & Agustien, 2019).

#### Hasil Estimasi dan Interpretasi

Peneliti hanya akan mengestimasi model yang didalamnya dapat menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. Hasil estimasinya melalui model FEM disajikan pada tabel 5. Berdasarkan table 5. Bahwa menunjukkan hasil estimasi koefisien pada masing-masing variabel berikut:

Koefisien regresi DAK senilai 1.99E-07 mengartikan bahwa jika terjadi peningkatan DAK sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia juga ikut meningkat sebesar 1,99%. Dan begitu juga sebaliknya, apabila terjadi penurunan DAK sebesar 1% maka IPM juga menurun 1,99%. Bisa dikatakan bahwa DAK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan DAK seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera tahun 2015-2019. DAK dari pemerintah pusat ini dimanfaatkan dalam penyediaan sarana prasana daerah. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan IPM.

Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara

Koefisien regresi DAU bernilai 4.86E-07 yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan DAU sebanyak 1% maka IPM juga ikut meningkat menjadi 4,86%. Dan begitu juga sebaliknya, apabila terjadi penurunan DAU 1% maka IPM akan menurun 4,86%. Bisa dikatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan DAU seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera tahun 2015-2019. Semakin besar DAU yang berasal dari APBN pemerintah pusat maka semakin besar belanja daerah yang dilakukan untuk pembangunan di daerah, sehingga, diharapkan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Tabel 5. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: IPM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/05/22 Time: 21:32  
 Sample: 2015 2019  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 33  
 Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6524.922	85.44537	76.36367	0.0000
DAK	1.99E-07	8.90E-08	2.233066	0.0273
DAU	4.86E-07	1.47E-07	3.306801	0.0012
PAD	5.06E-07	1.69E-07	2.985186	0.0034

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.983218	Mean dependent var	6946.315
Adjusted R-squared	0.978665	S.D. dependent var	478.4854
S.E. of regression	69.89013	Akaike info criterion	11.52196
Sum squared resid	630117.3	Schwarz criterion	12.19962
Log likelihood	-914.5614	Hannan-Quinn criter.	11.79704
F-statistic	215.9391	Durbin-Watson stat	0.956045
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 7, 2022

Nilai Koefisien regresi PAD sebesar 5.06E-07 yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan PAD sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia juga ikut meningkat sebesar 5,06%. Dan begitu juga sebaliknya, apabila terjadi penurunan PAD sebesar 1% akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 5,06%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan PAD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera dari tahun 2015 sampai tahun 2019. PAD yang berasal dari sumber ekonomi asli

daerah, sangat membantu untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ada. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Nilai koefisien determinasi nilai R-squared sebesar 0,983218 atau 98,32%. Dapat disimpulkan bahwa variable Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara sebesar 98,32% sedangkan sisanya 1,68% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Nilai nilai Probabilitas dari uji F (F-Statistik) sebesar 0,000000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama mempengaruhi IPM di Provinsi Sumatera Utara secara signifikan.

## Pembahasan

### Pengaruh DAK terhadap IPM Provinsi Sumatera Utara

Variabel DAK didasarkan atas hasil penelitian metode *Fixed Effect Model* yang memengaruhi IPM Provinsi Sumatera Utara secara signifikan dan positif. Maksudnya jika DAK meningkat maka IPM juga meningkat. Hal ini dikarenakan DAK yang dari tahun ke tahun dibagikan kepada kabupaten/Kota di Sumatera Utara selalu menurun. Meningkatnya Dana Alokasi Khusus di Sumatera Utara cenderung akan menimbulkan belanja modal yang lebih banyak lagi. Hal tersebut menyimpulkan bahwa DAK sangat berpengaruh pada jumlah belanja modal. Karena menurut PMK No.50/PMK.70/2017 "Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah" (Pambudi, 2021).

DAK bisa digunakan oleh Perda dalam melayani masyarakat melalui pembelanjaan modal dengan mengarahkannya pada perbaikan, peningkatan, pengadaan, dan investasi pembangunan sarana prasarana fisik yang berumur panjang dan ekonomis sekaligus sarana penunjangnya. Aset tetap yang pemerintah miliki dan berguna dalam pelayanan masyarakat akan meningkat seiring pemberian DAK, oleh karena itu banyaknya belanja modal diharapkan bisa meningkat seiring adanya alokasi DAK. Dengan demikian bisa dikatakan IPM bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan DAK. Walaupun demikian, mayoritas wilayah di Sumatera Utara belum memiliki fasilitas yang memadai dan pengelolaan DAK yang kurang tepat seperti daerah Kabupaten Nias Barat.

Hasil tersebut sejalan dengan temuan (Sarkoro, 2018) yang menyatakan "Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/ Kota Provinsi Sumut secara parsial". Kemudian, didukung juga penelitian yang dilakukan (Subagia & Utama, 2022) menghasilkan makin tinggi PAD maka makin meningkat IPM Kabupaten/kota di Provinsi Bali.

### Pengaruh DAU terhadap IPM Provinsi Sumatera Utara

Variabel DAU berdasarkan hasil penelitian metode *Fixed Effect Model* berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. Maksudnya ialah jika DAU meningkat maka IPM juga meningkat. Hal ini dikarenakan DAU yang diberikan kepada kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dibandingkan komponen transfer lain, DAU Provinsi Sumatera Utara mempunyai jumlah



Analisis pengaruh *dana alokasi khusus*, *dana alokasi umum* dan *pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara*

yang lebih banyak. DAU yang bersumber dari APBN merupakan contoh nyata pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan desentralisasi (Suryana, 2018). Akan tetapi DAU juga bisa habis hanya untuk menangani permasalahan keuangan yang disebabkan kapasitas fiskal daerah yang rendah atau untuk menggaji para pegawai Perda. Tahun 2019 gaji pokok meningkat sebanyak 5% akibatnya DAU yang dialokasikan meningkat menjadi 4,60 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab lainnya antara lain adanya tambahan DAU untuk bantuan pendanaan kelurahan dan membayar luran PBI BPJS yang meningkat. “Dari sisi realisasi, DAU tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 maupun secara nasional tahun 2019” (DJPB KEMENKEU, 2019). Hal tersebut menyimpulkan bahwa Kota/Kabupaten di Sumatera Utara menjadi salah satu contoh yang menunjukkan bahwa bantuan dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah oleh Perda di mana pengalokasian tersebut tergantung pada kapasitas dan kebutuhan fiskal serta alokasi dasar daerah.

Penelitian dari (Lestari et al, 2019) yang menguji “pengaruh DAU terhadap IPM membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan kedu Tahun 2012-2016”. Maksudnya IPM dapat meningkat akibat adanya peningkatan DAK. Selanjutnya, (Rivando et al, 2019) meneliti variabel serupa yang memperkuat temuan tersebut yang menyimpulkan bahwa DAU memengaruhi IPM secara signifikan dan positif.

#### *Pengaruh PAD terhadap IPM Provinsi Sumatera Utara*

Variabel PAD berdasarkan penelitian melalui metode *Fixed Effect Model* berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. Maksudnya, jika PAD meningkat maka IPM juga meningkat. Perda Kota/Kabupaten sangat mengandalkan PAD ini karena hasilnya bersumber dan dimanfaatkan atau digunakan berdasarkan prioritas daerah yang bersangkutan secara langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahannya (Gulo, 2022). Bisa disimpulkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Utara sehingga sudah seharusnya setiap masyarakatnya bisa merasakan manfaat atau dampak positif dari adanya peningkatan tersebut (Nurhabibah et al, 2022). Namun, terdapat beberapa penerimaan Daerahnya yang masih rendah yaitu Kabupaten Nias Selatan. Hal ini yang membuat ketimpang disuatu daerah tinggi dan penduduk masyarakat didaerahnya menjadi tidak makmur dan sejahtera dikarenakan tinggi tinggat ketimpangan disuatu daerah tersebut. Perencanaan peningkatan kemandirian Perda akan sangat membutuhkan jumlah PAD yang ada. Namun, secara nyatanya bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara masih sangat bergantung pada biaya yang pemerintah pusat salurkan. Rata-rata besaran PAD yang ada di Provinsi ini hanya sebanyak 19,51%, yang berarti bahwa 74,51% pembiayaan belanja Perda dari wilayah tersebut masih sangat bergantung pada pembiayaan dari pusat (DJPB KEMENKEU, 2019).

Temuan peneliti di sini sama dengan temuan dari (Wididarma & Jember, 2021) yang menyimpulkan “Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Hal ini diperkuat oleh temuan dari (Kenap & Walandouw, 2021) yang menyatakan bahwa “PAD memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila

pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan sasaran". Riset yang dilakukan (Suhyanto et al, 2020) juga menyebutkan PAD memengaruhi IPM secara signifikan dan positif.

### KESIMPULAN

Kesimpulan yang peneliti peroleh dalam penelitian ini ialah bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Sehingga jika DAK meningkat maka IPM juga mengalami peningkatan. Didukung juga dengan DAK di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yang selalu bertambah setiap tahunnya. Selain itu, diketahui juga bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jika DAU yang diberikan kepada Kabupaten/Kota meningkat maka akan terjadi peningkatan IPM. Kemudian, PAD juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jika terjadi peningkatan PAD maka akan terjadi peningkatan IPM pula. Peneliti menyarankan perlu adanya penelitian lanjutan, seperti penambahan periode waktu dan penambahan variabel lain. Selain itu, perlunya modifikasi model penelitian untuk mendapatkan hasil dengan variasi model.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afini, N. (2019). Pengaruh pdrb perkapita dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pemerataan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 44-48. <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.90>
- BPS, (2015). *Data indeks pembangunan manusia*. Provinsi Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik. diakses <https://sumut.bps.go.id>
- BPS, (2016). *Data indeks pembangunan manusia*. Provinsi Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik. diakses <https://sumut.bps.go.id>
- BPS, (2017). *Data indeks pembangunan manusia*. Provinsi Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik. diakses <https://sumut.bps.go.id>
- BPS, (2018). *Data indeks pembangunan manusia*. Provinsi Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik. diakses <https://sumut.bps.go.id>
- BPS, (2019). *Data indeks pembangunan manusia*. Provinsi Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik. diakses <https://sumut.bps.go.id>
- DJPK, (2019). *Data pendapatan asli daerah*. Provinsi Sumatera Utara: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. diakses <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Gulo, H. (2022, December). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (pp. 25-31). [Google scholar](#)
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127-135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>

*Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara*

- Hendarmin, H. (2019). Dampak pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan modal manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 245-271. DOI: <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.11186>
- Sari, I.A.C.Y & Supadmi, Ni Luh. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 2409-2438. [Google scholar](#)
- Kenap, R. A., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis trend efektifitas realisasi belanja daerah pada badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2). 1088-1095 [Google scholar](#)
- Kirana, I. O., Nasution, Z. M., & Wanto, A. (2019). Proyeksi indeks pembangunan manusia di Indonesia menggunakan metode *statistical parabolic* dalam menyongsong revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 16(2), 202-212. <https://doi.org/10.23887/jptk-undiksha.v16i2.18178>
- Kresna, H. S., & Ardini, L. (2020). Pengaruh *free cash flow*, profitabilitas, kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3). [Google scholar](#)
- Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2019). Analisis pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(1), 100-113. [Google Scholar](#)
- Machmud, J., & Djau, D. S. (2019). Analisis faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gorontalo. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 2(2), 101-110. [Google scholar](#)
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1). 51-72. <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi data panel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42-52. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.28950>
- Nurhabibah, A., Boedirochminarni, A., & Sari, N. P. (2022). Pengaruh PAD dan angkatan kerja terhadap IPM di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(1), 26-40. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i1.19406>
- Pambudi, A. S. (2021). Optimalisasi pemanfaatan *Big Data* dalam evaluasi *on going* dak fisik bidang kesehatan saat pandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*, 4(2), 201-217. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i2.96>
- Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah (Pad), dana bagi hasil (Dbh), dana alokasi umum (Dau), dan dana alokasi khusus (Dak) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Minahasa Tenggara dengan pengeluaran di bidang kesehatan sebagai variabel intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 132-149. <https://doi.org/10.35794/jpekd.35104.22.2.2021>



- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., & Nugraha, N. A. (2021). Ekonomi pembangunan. Yayasan Kita Menulis.
- Riviando, A., Agustin, H., & Halmawati, H. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.52>
- Sarkoro, H., & Zulfikar, Z. (2018). Dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia (studi empiris pada pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 54-63. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1972>
- Septyana, E., Setiawan, A., & Susanto, B. (2021). Analisis indeks pembangunan manusia Provinsi-provinsi di Indonesia menggunakan indeks baru berdasarkan metode *resampling*. *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains*, 4(1), 9-16. <https://doi.org/10.24246/juses.v4i1p9-16>
- Subagia, I. G. N. K. A., & Utama, M. S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2013-2020. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(12), 1511-1521. [Google scholar](#)
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M., Purba, S., Syafrizal, S., & Susilawaty, A. (2020). Konsep dasar pengabdian kepada masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh dana transfer dana desa dan pad terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(3), 285-305. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478>
- Suryana, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 9(2), 67-72. <https://doi.org/10.17509/jimb.v9i2.14000>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika pengantar dan aplikasi disertai panduan eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wididarma, K., & Jember, M. (2021). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(7), 2982-3010. [Google scholar](#)



# Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

9%

★ [dspace.uii.ac.id](https://dspace.uii.ac.id)

Internet Source

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
UNIMED  
THE  
Character Building  
UNIVERSITY